



Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai

Zainal

Program Studi Teknik Manajemen Industri
Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia, Indoensia.

Diterima: Oktober 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublikasi: November 2019;
Corresponding author: zhafran.zain226@gmail.com

Abstrak

SAK ETAP merupakan solusi dari masalah yang kerap menerpa koperasi, yaitu masalah pengelolaan keuangan. Sebagai standar yang ditujukan untuk memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pihak eksternal perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan KSU Sumber Rezeki Kota Binjai belum menerapkan SAK ETAP secara benar. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal KSU Sumber Rezeki Kota Binjai hanya menyajikan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan catatan laporan keuangan namun belum menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas sesuai SAK ETAP. Pada laporan neraca dan perhitungan hasil usaha ada beberapa akun yang digunakan kurang sesuai dengan SAK ETAP.

Kata kunci : SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Laporan keuangan).

How to Cite: Zainal (2019), Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai, *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*, 3(2): 104 - 112

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 (2015:7). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Margono Djojohadikoesoemo (2007:23), koperasi ialah perkumpulan manusia seorang – seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi. Berbeda dengan badan usaha bukan koperasi yang bergantung pada kekuatan pemilik modal usaha sehingga keputusan diambil sesuai dengan signifikansi kepemilikan modal.

Keanggotaan koperasi memiliki sifat sukarela tanpa ada pemaksaan untuk ikut serta di dalamnya. Anggota koperasi terdiri dari karyawan aktif dalam perusahaan dan atau perorangan sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk kegiatan usaha koperasi dilakukan dalam suatu sistem dan jaringan usaha koperasi, sedangkan kegiatan non usaha dilakukan dalam ikatan antar non anggotanya.

Sebagaimana badan usaha lainnya, koperasi juga membutuhkan bantuan dana atau permodalan dari pihak pemerintah ataupun pihak perbankan untuk perkuatan modal. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penerimaan bantuan dana atau permodalan adalah adanya informasi yang menggambarkan keberadaan Koperasi berupa laporan keuangan.

Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi – koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain.

Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya keseragaman tiap laporan keuangan yang dibuat perusahaan.

Pedoman penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasi dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan.

Saat ini, Indonesia memiliki empat standar keuangan yaitu PSAK berbasis IFRS, PSAK syariah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan SAK ETAP. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Seiring dengan dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan diberlakukannya SAK ETAP, maka koperasi – koperasi yang ada di Indonesia diarahkan untuk menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. SAK ETAP adalah standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia, tetapi semua kegiatan koperasi juga berpedoman pada Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru yang dikeluarkan oleh menteri terkait dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NO. 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang

disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2008. KSU Sumber Rezeki telah terdaftar pada Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dengan Status Badan Hukum No. 74/BH/II.13/VIII/2009 Tanggal 10 Agustus 2009, beralamat di Jalan Danau Ranau Kelurahan Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Binjai Timur – Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Adapun masalah yang ditemui pada KSU Sumber Rezeki adalah bahwa KSU Sumber Rezeki dalam penyusunan laporan keuangan tidak menyusun sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Pada laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh KSU Sumber Rezeki berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP laporan keuangan terdiri dari : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh KSU Sumber Rezeki seharusnya dilengkapi dengan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Dampak dari hal tersebut menyebabkan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan tidak dapat diketahuinya informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan informasi terhadap laporan keuangan yang belum disajikan tersebut.

Berdasarkan uraian yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki dengan judul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai”.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan menurut SAK ETAP.
2. Ketidaksesuaian dalam penyusunan akun piutang di laporan neraca koperasi menurut SAK ETAP.
3. Ketidaksesuaian dalam penyusunan akun pendapatan di laporan penghasilan sisa usaha menurut SAK ETAP.
4. Tidak lengkapnya informasi dalam catatan atas laporan keuangan pada koperasi.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang terjadi di koperasi, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : “Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki Kota Binjai ?”

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki Kota Binjai.

2. Memberikan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan SAK ETAP bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki Kota Binjai.

Tinjauan Pustaka

a. Landasan Koperasi

Pendiri koperasi memerlukan suatu landasan sebagai dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya. Pandji dan Ninik (2007:8) menjelaskan bahwa landasan – landasan koperasi dapat terbagi atas :

1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Landasan idiil merupakan dasar yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita – cita koperasi. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Landasan idiil koperasi adalah Pancasila.

2. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia

Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945 sedangkan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” merupakan landasan gerak koperasi.

3. Landasan Mental Koperasi Indonesia

Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran diri.

b. Jenis – Jenis Koperasi

Menurut Agung Feryanto (2011:65) jenis – jenis koperasi yang berkembang di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan suatu unit usaha bersama yang kegiatannya menyediakan berbagai barang konsumsi. Kegiatan usaha koperasi konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi beranggotakan para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Peran aktif pelaku UKM ini yang diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha koperasi produksi. Contoh koperasi produksi adalah koperasi batik, kulit, produksi pertanian, dan kerajinan.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (Kospin) merupakan unit usaha bersama yang dibentuk oleh beberapa orang guna membantu anggota dan masyarakat di bidang keuangan.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan unit usahanya yang kegiatannya memberikan layanan atau jasa kepada anggota atau masyarakat. Contoh koperasi jasa adalah koperasi jasa transportasi dan koperasi asuransi.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan unit usaha yang kegiatannya meliputi semua bidang seperti konsumsi, produksi, simpan pinjam, maupun jasa. Saat ini, jenis koperasi serba usaha dijumpai banyak di

lingkungan sekitar. Contoh koperasi serba usaha adalah koperasi unit desa.

c. Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

• Laporan Keuangan

Dalam menganalisa dan menafsirkan laporan keuangan, seorang analis harus mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bentuk – bentuk maupun prinsip – prinsip penyajian laporan keuangan serta masalah – masalah yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:18) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan kedalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dari proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan.

Menurut Wahyudiono (2014:10) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak – pihak luar perusahaan.

Menurut Jumingan (2011:46) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

- Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara periodik. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan (Munawir, 2004:32). Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1 (2016:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan serta menganalisis data – data yang diperoleh dari KSU Sumber Rezeki Kota Binjai untuk selanjutnya diolah kembali untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki Kota Binjai.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini adalah : penerapan SAK ETAP (standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik). SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia. SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK ETAP terdiri dari 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir.

SAK ETAP akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria, yaitu: Tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki Jalan Danau Ranau Kelurahan Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Binjai Timur – Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada laporan pertanggung-jawaban yang disusun oleh KSU Sumber Rezeki, bahwa laporan yang disajikan hanya berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh KSU Sumber Rezeki seharusnya dilengkapi dengan laporan arus kas dan laporan

perubahan ekuitas. Dampak dari hal tersebut menyebabkan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan tidak dapat diketahuinya informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan informasi terhadap laporan keuangan yang belum disajikan tersebut.

Seharusnya KSU Sumber Rezeki Kota Binjai membuat kelima laporan keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan menurut SAK ETAP. Sehingga bisa dikatakan laporan keuangan yang ada pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai masih belum sesuai dengan SAK ETAP.

Selanjutnya dalam penyusunan akun piutang di laporan neraca koperasi. Didalam neraca yang dilaporkan KSU Sumber Rezeki, adanya penyajian nilai akun piutang (kredit) sebesar Rp. 292.000.000 dan penyajian nilai akun piutang ragu - ragu sebesar Rp. 17.500.000 seperti yang terdapat didalam format neraca berikut :

Tabel 1 Neraca KSU Sumber Rezeki

No.	Aktiva	31 Des 2017 (Rp.)
I	Aktiva Lancar	
	Kas	17.000.000
	Bank	8.204.000
	Piutang (kredit)	292.000.000
	Piutang ragu - ragu	17.500.000

Laporan Pertanggungjawaban KSU Sumber Rezeki

Sedangkan menurut SAK ETAP seharusnya penyajian akun piutang terbagi menjadi dua yaitu piutang anggota dan piutang non anggota. Dampak dari kesalahan penyusunan akun piutang tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya nilai dari masing - masing piutang, sehingga jumlah piutang anggota terlalu besar dan menimbulkan

kebingungan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

KSU Sumber Rezeki Kota Binjai telah membuat neraca dalam laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Tetapi pada aset lancar tepatnya pada akun piutang, KSU Sumber Rezeki Kota Binjai belum menyusun akun piutang sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

Dalam penyusunan laporan perhitungan hasil usaha KSU Sumber Rezeki tidak menyajikan sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Adapun yang tidak sesuai dalam penyajian pendapatan. Didalam laporan perhitungan hasil usaha, adanya penyajian nilai akun pendapatan jasa pinjaman sebesar Rp. 70.080.000 dan penyajian nilai akun pendapatan unit usaha senilai Rp. 0 seperti yang terdapat didalam format neraca berikut :

Tabel 2 Sisa Hasil Usaha KSU Sumber Rezeki

No.	Pendapatan	31 Des 2017 (Rp.)
I	Pendapatan Pendapatan Jasa Pinjaman Pendapatan Unit Usaha	70.080.000 -

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KSU Sumber Rezeki

Sementara menurut SAK ETAP yang seharusnya penyajian akun pendapatan terbagi dua bagian yaitu pendapatan anggota dan pendapatan non anggota. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia N0. 12 Tahun 2015 pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai pendapatan bruto, sedangkan pendapatan yang berasal dari non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan). Dengan tidak dipisahkannya pendapatan dari

anggota dan non anggota, maka laporan keuangan koperasi tidak dapat mencerminkan tujuan koperasi yang lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggota daripada non anggota. Akibatnya laporan keuangan disajikan tidak efektif dalam pengambilan keputusan dan tidak mencerminkan tujuan koperasi yang mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggota daripada non anggota.

KSU Sumber Rezeki Kota Binjai telah membuat laporan perhitungan hasil usaha sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Tetapi penyusunan akun pendapatan pada laporan perhitungan hasil usaha tersebut belum sesuai dengan SAK ETAP. KSU Sumber Rezeki masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum memisahkan antara pendapatan anggota dengan non anggota. Sedangkan pada realita yang ada pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai tidak hanya melayani anggota tetapi juga melayani non anggota.

Dan yang terakhir pada catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK ETAP pada catatan atas laporan keuangan harus dilengkapi dengan informasi antara lain :

- a. Gambaran umum koperasi
- b. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
- c. Kebijakan akuntansi
- d. Penjelasan yang mendukung pos – pos dan perhitungan hasil usaha

Sedangkan pada KSU Sumber Rezeki tidak adanya keterangan tentang gambaran umum koperasi yang meliputi sejarah koperasi, NPWP koperasi, dan ijin – ijin usaha koperasi. Catatan atas laporan keuangan pada KSU Sumber Rezeki juga tidak membuat informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan penjelasan tentang dasar kebijakan akuntansi mengenai piutang. Sehingga

dampaknya adalah catatan atas laporan keuangan pada KSU Sumber Rezeki kurang lengkap dalam penyediaan informasi laporan keuangan sehingga tidak dapat diketahuinya informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan informasi terhadap penjelasan yang belum disajikan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai belum sesuai dengan penerapan pada laporan keuangan menurut SAK ETAP. Hal – hal yang menyebabkan ketidaksesuaiannya tersebut antara lain :

1. KSU Sumber Rezeki Kota Binjai hanya menyusun laporan keuangan berupa neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP laporan keuangan terdiri dari : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.
2. Dalam penyusunan akun piutang di laporan neraca KSU Sumber Rezeki Kota Binjai menyusun akun piutang menjadi dua yaitu piutang dan piutang ragu-ragu. Sedangkan menurut SAK ETAP seharusnya penyajian akun piutang terbagi menjadi dua yaitu piutang anggota dan piutang non anggota.
3. Dalam penyusunan akun pendapatan di laporan perhitungan hasil usaha KSU Sumber Rezeki Kota Binjai menyusun akun pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan jasa pinjaman dan pendapatan unit usaha.

Sementara menurut SAK ETAP yang seharusnya penyajian akun pendapatan terbagi dua bagian yaitu pendapatan anggota dan pendapatan non anggota.

4. Pada Catatan atas laporan keuangan KSU Sumber Rezeki kota Binjai tidak membuat sejarah koperasi, NPWP koperasi, dan ijin-ijin usaha koperasi serta tidak membuat informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP catatan atas laporan keuangan harus dilengkapi dengan gambaran umum koperasi, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan Penjelasan yang mendukung pos – pos dan perhitungan hasil usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Feryanto (2011). Koperasi Dan Perannya Dalam Perekonomian. Klaten : Macan Jaya Cemerlang.
- Anggun Sabella (2016). Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi KSP Tirta Sari. Skripsi Universita Jember (UNEJ), Jember.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- M. Iskandar Soesilo (2008). Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.
- S. Munawir (2009). Analisis Laporan Keuangan. Edisi ke 4. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jakarta : Salemba 4.
- Siagian, Pardomuan Raven (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. Jurnal Emba Vol.4 No.1 : hal 1450 – 1460.